

Tajuk

Mengawal Dana PEN 2022

Tahun 2022 bisa jadi merupakan ajang pertarungan dan titik balik pemulihan ekonomi di masa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir. Indikator semakin baiknya geliat ekonomi di Tanah Air setidaknya sudah terlihat sejak kuartal II/2021 di mana pertumbuhan ekonomi tercatat positif di angka 7,07%. Tren positif ini berlanjut pada kuartal III/2021 dengan angka pertumbuhan 3,51%.

Sejumlah lembaga memperkirakan, tiga bulan terakhir 2021, angka pertumbuhan ekonomi nasional juga diprediksi tetap positif. Bank Indonesia (BI) misalnya memperkirakan angka pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir tahun 2021 bisa di atas 4,5%. BI juga memprediksi, jika diakumulasikan, pertumbuhan sepanjang tahun lalu bisa di kisaran 3,2-4,4%. Adapun Bank Dunia (World Bank) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini diperkirakan di kisaran 3,7%, turun bila dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya 4,4%.

Melihat beberapa proyeksi di atas, setidaknya ada harapan ekonomi akan tetap tumbuh kendati masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 5%. Adapun untuk tahun ini, berdasarkan UU APBN 2022, pertumbuhan ekonomi dalam negeri dipatok di level 5,2%.

Dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok di atas 5% tersebut, tentu bukan pekerjaan mudah untuk mewujudkannya. Sejumlah tantangan terlihat di depan mata. Yang paling kentara adalah belum pulihnya dampak pandemi di sektor usaha dan lemahnya daya beli masyarakat yang terlihat dari rendahnya angka inflasi. Ini diperkirakan akan berpengaruh hingga tahun ini, terlebih dengan kemunculan varian Omicron, yang setiap harinya selalu ada penambahan kasus.

Pada awal tahun baru 2022, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, varian terbaru Covid-19 yang berasal dari luar negeri ini tercatat sebanyak 136 orang. Angka tersebut berasal dari penambahan 68 kasus baru di pengujung 2021 dan terjadi pada pelaku perjalanan luar negeri.

Kondisi ini tentu saja membutuhkan perhatian para pemangku kepentingan mengingat dampak varian baru Covid-19 tidak bisa dikesampingkan. Apalagi tingkat vaksinasi nasional sampai saat ini baru mencapai 54% dari target 208 juta sasaran vaksinasi.

Terkait penanganan Covid-19, pemerintah masih memberikan perhatian cukup besar. Ini bisa dilihat dari APBN 2022 dimana porsi pendanaan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp414,1 triliun. Angka itu juga dibandungkan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp744,7 triliun memang kalah besar. Akan tetapi dana tersebut diyakini akan cukup efektif dalam upaya menangani dampak pandemi, terutama di sektor kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat, dan pemulihan ekonomi.

Di sektor kesehatan, tidak kurang dari Rp117,9 triliun siap digelontorkan. Beberapa fokus di sektor ini antara lain dialokasikan untuk *testing, tracing*, dan *treatment* atau perawatan Covid-19 yang dikerjakan dengan BPJS Kesehatan. Selain itu termasuk di dalamnya untuk insentif tenaga kesehatan, vaksinasi, dan insentif perpajakan vaksin.

Pada pos perlindungan sosial masyarakat, sedikitnya Rp158,4 triliun telah disiapkan. Beberapa sasaran program ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, yakni berupa bantuan bagi keluarga tidak mampu melalui program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pekerja, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Adapun untuk program penguatan pemulihan ekonomi disediakan anggaran Rp141,4 triliun yang akan disalurkan untuk kegiatan infrastruktur konektivitas, pariwisata/ekonomi kreatif, investasi pemerintah, dan insentif perpajakan.

Secara keseluruhan, APBN 2022 menetapkan anggaran belanja sebesar Rp1.944,5 triliun, naik Rp6,3 triliun dari usulan sebelumnya Rp1.938,3 triliun. Adapun pos penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp1.846,1 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan Rp1.510 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp335,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun. Dari komposisi penerimaan dan pendapatan negara seperti di disebutkan di atas, pemerintah masih memberikan peluang defisit anggaran lebih dari 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Melihat porsi dan arah kebijakan pemerintah yang masih fokus pada penanganan pandemi, maka sudah sewajarnya strategi itu dilakukan. Hanya saja mesti diingat bahwa efektivitas penyaluran dana PEN harus melalui tahapan yang jelas, terutama mekanisme bagi pelaku usaha yang masih terdampak. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah mengawal agar PEN bisa membantu daya beli masyarakat yang selama ini menjadi andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. □



KORAN SINDO/TAHYUDIN

Kementerian Agama dan Gema Moderasi Beragama

(Refleksi Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-76)



WILDANI HEFNI

Direktur Rumah Moderasi Beragama, Dosen Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Tanggal 3 Januari diperingati sebagai Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama yang dalam bahasa lain disebut sebagai hari lahir. Kementerian yang memiliki *tagline* Ikhlas Beramal ini ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946. Peringatan HAB 2022 ini menandakan kementerian ini telah berusia 76 tahun. HAB dirayakan untuk mengugah semangat dan menguatkan amal bakti dalam melayani serta membimbing kehidupan beragama di republik ini.

Tentu banyak hal telah dilakukan oleh Kementerian Agama, utamanya dalam menghidupkan keberagaman yang damai dan toleran. Eksistensi Kementerian Agama dalam konstruksi teoretis dipandang sebagai kementerian yang secara intensif menangani dan mengelola dinamika dan corak kehidupan keagamaan. Persoalan ini, jika ditarik lebih luas, sejatinya Kementerian Agama meneguruskan hampir keseluruhan dinamika kehidupan bangsa, kaitannya dengan kehidupan keagamaan, hubungan antarumat beragama, *nation-building*, dan integrasi bangsa secara umum.

Tidak mengherankan jika ke-

menterian ini senantiasa menjadi perbincangan publik, bukan melalui karena persoalan "person" atau karakter dari seorang pimpinan tertinggi, melainkan karena peran dan kontribusinya yang sangat besar dalam republik ini, terutama dalam menjahit tenunan sosial (*social fabric*) keutuhan bangsa. Derap langkah kementerian ini juga akan dijadikan indikator penting tentang situasi dan perkembangan masyarakat bangsa.

Tidak berlebihan bila sejawan Taufik Abdullah menyebut dalam kata pengantar buku *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (1998), bahwa langkah-langkah Menteri Agama serta keberhasilan dan kegagalannya, bukan saja indikator dari kinerja Departemen (Kementerian) Agama yang dipimpinnya, tetapi juga sesungguhnya merupakan gambaran perkembangan sosial, politik, dan ekonomi serta budaya yang sedang terjadi.

Sebagai refleksi pada HAB ke-76 ini, kita patut bersyukur atas beberapa capaian yang cukup menggembirakan. Jika kita cek data terbaru dengan menggunakan prinsip *evidentialism* di atas realitas yang majemuk, indeks ke-salehan umat beragama mengalami kenaikan yaitu 83,92, sebelumnya pada 2020 capaiannya 82,52. Adapun indeks kerukunan umat beragama, sebagaimana survei Balitbang Diklat Kemendagri 2021, berada dalam kategori baik. Jika capaian 2020 sebesar 67,46, berbedanya pada tahun 2021 yang mengalami kenaikan menjadi 72,39.

Tantangan Keberagaman

Pada satu sisi, capaian itu sangat menggembirakan. Di sisi yang lain, tantangan keberagaman di republik ini masih menyisakan rimbanya "kecelakaan sosial". Monopoli tafsir keagama-

an, sikap intoleran, dan sektarianisme masih menghantui wajah republik ini. Beruntung, Menteri Yaqut Cholil Qoumas bergerak cepat, sigap dan berani.

Satu tahun memimpin Kementerian Agama, Gus Men dengan cerdas melihat beberapa hal fundamental yang harus diselesaikan, khususnya berkaitan dengan kehidupan keberagaman. *Pertama*, kerukunan umat beragama. Karena itu, program penguatan moderasi beragama menjadi program prioritas.

Menguatnya arus kelompok konservatisme dan eksklusivisme yang salah satunya ditandai dengan lahirnya politik identitas dan polarisasi yang dalam, meniscayakan untuk menaikkan konsentrasi pada penguatan komitmen kebangsaan dengan merawat keindonesiaan. Gus Men sering menegaskan bahwa dirinya adalah Menteri Semua Agama. Penahbisan ini sekaligus menguatkan secara kelembagaan bahwa Kementerian Agama adalah milik semua agama.

Kedua, pernyataan Gus Men saat ditunjuk sebagai menteri agama langsung mengentak publik. Gus Men secara tegas menyebutkan, melalui Kementerian Agama ia akan menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Gus Men hendak menunjukkan, baik melalui argumen akademis maupun secara empirik, bahwa agama menjadi inspirasi sebagai tatanan nilai dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Tatanan ini kemudian akan mengantarkan pada terdapatnya solidaritas dan solidaritas kemanusiaan. Bukan sebaliknya, agama bukan diperalat sebagai aspirasi kepentingan subjektif kelompok tertentu, bahkan untuk memperoleh kekuasaan.

Gema Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama

ma menemukan momentumnya di tengah menguatnya pelbagai gerakan ekstrem yang berhaluan literal (*literal approach*) dan kemudian menjadi kelompok militan (*hard liners*). Moderasi beragama kemudian disuarakan (*speak up*), diarusutamakan (*mainstreaming*), dikuatkan (*strengthening*), dan diimplementasikan (*implementing*), sebagai satu gerakan sistematis-masif. Gema penguatan moderasi beragama yang dibangun oleh Kementerian Agama ini telah memberikan satu wawasan penting tentang penguatan esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.

Gema gerakan penguatan moderasi beragama bukanlah isapan jempol, yang oleh sebagian kelompok dianggap sekedar gebyar formalitas. Bahkan, moderasi beragama dianggap sebagai bagian dari liberalisasi pemikiran untuk mengimpor pemikiran Barat. Tentu, spekulasi menjadi barang mubah. Namun *prejudice* yang tak berdasar hanya akan memperkeruh suasana.

Faktanya, penguatan moderasi beragama telah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang itu berarti menjadi program di setiap lembaga dan kementerian negara. Kementerian Agama saat ini juga telah merumuskan peta jalan penguatan moderasi beragama 2021-2024 secara sistematis.

Program penguatan moderasi beragama menjadi gerakan kolektif hasil dari pantulan inisiatif Kementerian Agama. Seluruh lapisan masyarakat, terutama di lembaga-lembaga yang secara vertikal berada di bawah Kementerian Agama menggalakan penguatan moderasi beragama dalam setiap program dan kegiatan.

Hal itu bisa dijumpai dalam kegiatan-kegiatan di kantor-kantor wilayah Kementerian

Agama di provinsi maupun kabupaten/kota, di lembaga pendidikan Islam, pesantren, sekolah, madrasah, termasuk di perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam konteks perguruan tinggi keagamaan Islam, didirikan Rumah Moderasi Beragama (RMB). Rumah moderasi beragama menjadi pusat edukasi, advokasi, dan penguatan Islam damai-ramah, *Islam rahmatan lilalamin*, yang dalam perjalanan menginisiasi pelbagai program strategis. Tidak hanya itu, moderasi beragama kemudian menjadi salah satu isu utama dalam aktivitas belajar mengajar, riset, dan pengabdian masyarakat, dengan fokus pada kajian keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.

Sebagai sebuah tamsil, di lingkup internal kampus memberikan diklat bagi sivitas akademika termasuk bagi para organisasi kemahasiswaan, dan dalam lingkup eksternal menggendang para penyuluh agama dan kepala sekolah sebagai penggerak moderasi beragama, sebagaimana yang dilakukan oleh Rumah Moderasi Beragama UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Alhasil, upaya penguatan moderasi beragama ini perlu dipercepat lagi. Komitmen untuk mencerdaskan kehidupan keagamaan, mengokohkan keberagaman (*diversity*), dan menghormati pihak lain (*others*) sebagai jangkar tali kemanusiaan, tidak hanya menjadi tugas kelembagaan, melainkan komitmen individu.

Gerakan moderasi beragama yang mengajarkan pemahaman dan pengalaman beragama dengan sikap dan cara pandang keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) menjadi bukti otentik kehadiran negara sebagai pelayanan umat untuk melindungi martabat kemanusiaan. Selamat HAB Ke-76 Kemenag RI. □

Harapan dan Tantangan Pembangunan Daerah pada 2022



CANDRA FAJRI ANANDA

Staf Khusus Kementerian Keuangan RI

Tahun 2021 telah berlalu dengan beragam cerita di dalamnya. Pandemi yang belum usai memberikan banyak pelajaran bagi kita untuk terus menjalani kehidupan, meski di tengah tantangan dan hambatan. Kini pintu perjalanan pada 2022 telah terbuka dan siap menyambut semangat dan harapan baru di tengah gejolak pandemi yang juga belum berhenti.

Pemerintah berhasil menutup perjalanan 2021 dengan mencatatkan keberhasilan kinerja penerimaan pajak serta kepatuhan dan cukai yang positif sepanjang tahun. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa hingga 26 Desember 2021, total penerimaan pajak mencapai

Rp1.231,87 triliun atau 100,1% dari target dalam APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun.

Sejarah mencatat, pencapaian yang tidak mudah ini sebagai kali pertama target penerimaan pajak tercapai setelah 12 tahun berturut-turut gagal mencapai target alias *shortfall*. Keberhasilan penerimaan pajak mencapai target tidak lepas dari kinerja positif sejumlah kantor pelayanan pajak (KPP). Di sisi lain, tren penerimaan positif juga berhasil dicapai oleh Kepabeanan dan Cukai yang telah terealisasi sebesar Rp232,3 triliun atau 108,1% terhadap target pada APBN 2021, tumbuh 26,6% (yoy).

Berbagai capaian positif ekonomi pada 2021 kini membawa optimisme keberhasilan Indonesia dalam menggapai keberhasilan pemulihan ekonomi di tahun ini. Mobilitas masyarakat yang terus meningkat menjadi bahan bakar bagi roda perekonomian Indonesia untuk bergerak maju. Data menunjukkan bahwa seiring dengan kondisi pandemi yang relatif terjaga dan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), untuk pertama kali, pada kuartal IV rata-rata mobilitas menunjukkan nilai positif, yaitu di angka 1,4.

Indikator konsumsi dan produksi terkini juga turut menun-

jukan penguatan yang solid dan diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Meski pemulihan ekonomi global dan domestik terus berlanjut, volatilitas dan ketidakpastian masih cukup tinggi. Berbagai risiko seperti penyebaran virus Covid-19 varian Omicron, percepatan *tapering off* AS, meningkatnya tekanan inflasi global, serta perlambatan ekonomi China masih perlu terus diperhatikan.

Tantangan Perekonomian Daerah

Geliat kinerja pembangunan ekonomi daerah di pengujung 2021 terus menunjukkan perbaikan. Sampai akhir November 2021, realisasi belanja negara mencapai Rp2.310,4 triliun, tumbuh 0,1% (yoy). Kinerja belanja negara konsisten membaik seiring akselerasi atas kebutuhan belanja di periode sebelumnya. Semangat kerja keras melalui belanja APBN juga didukung oleh kinerja program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Meski demikian, pada sisi fiskal daerah, realisasi penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) baru mencapai Rp711,0 triliun, atau 94,1% terhadap pagu APBN. Capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2020 sebesar 99,6% disebabkan oleh beberapa pemerintah daerah

(pemda) yang belum memenuhi atau belum menyampaikan laporan syarat-syarat.



KORAN SINDO/WAWAN BASTIAN

Pembangunan ekonomi Indonesia belum merata dengan masih banyaknya daerah yang masih tertinggal. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sejatinya akan selalu seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Selama ini, TKDD meningkat sebesar rata-rata 10,1% per tahun pada periode tahun 2011-2019 (para-Covid-19). Porsi TKDD terhadap belanja negara rata-rata mencapai 34,0% dan rasionya terhadap PDB rata-rata mencapai 5,4%.

Akan tetapi, meningkatnya

TKDD belum mampu mencegah ketimpangan pembangunan dan fiskal di Indonesia. Data juga menunjukkan bahwa ukuran realisasi belanja masih didominasi dari Pulau Jawa.

Di masa pandemi ini keberhasilan program vaksinasi adalah formula penting bagi pemulihan ekonomi baik di daerah maupun nasional. Hal itu menegaskan bahwa tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa ada pemulihan pandemi. Dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan Covid-19 semata, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemulihan ekonomi dari daerah hingga nasional. Harapan pemulihan ekonomi tercapai dengan terbentuknya *herd immunity* melalui vaksinasi. Karena itu, akselerasi program vaksinasi di setiap wilayah Indonesia perlu terus didorong untuk dapat mendukung berbagai program pemulihan ekonomi di setiap daerah.

Pada sisi fiskal daerah, masih terlihat ketergantungan yang tinggi APBD daerah terhadap dana transfer. Saat ini secara rata-rata ketergantungan daerah, baik provinsi maupun kabupaten, terhadap TKDD.

Sementara itu, seiring dengan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, pendapatan asli daerah berkisar 12,87%.

Selain itu, dominasi belanja daerah masih pada belanja pegawai. Untuk itu sangat penting, daerah (termasuk pusat) memikirkan ukuran yang tepat (*right size*) besaran organisasi.

Pada 2022 akan berlaku Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mengubah formulasi dana alokasi umum (DAU) dimana ada masa transisi tiga tahun untuk membatasi belanja pegawai. Idealnya saat ini, daerah dan pusat mulai memetakan beban kerja dan kebutuhan riil tenaga pegawai yang diperlukan untuk mencapai standar layanan tertentu.

Selanjutnya setelah ada reformulasi DAU, dana-dana transfer yang lain seperti dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID) maupun dana bagi hasil (DBH) perlu diarahkan agar tercapai dan mendukung program nasional dan daerah. Porsi DAK (baik fisik dan nonfisik) sebaiknya diperbesar mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Kunci Keberhasilan Pembangunan Daerah

Selain perubahan dalam dana perimbangan (UU HKPD), ada beberapa faktor lain yang perlu disiapkan dari sisi pemerintah daerah. Kita sadar bahwa

kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah berbeda. Meski demikian, selalu ada juara dalam perjalanan otonomi, yang terlihat adalah peran krusial kepemimpinan (*leadership*) yang terbuka, inovatif serta kolaboratif menjadi kunci keberhasilan daerah.

Selain itu, birokrasi di pemerintahan (daerah dan pusat). Hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Aziz (2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa penggunaan dana desa masih belum optimal karena kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana otonomi desa masih belum memadai.

Perjalanan dalam membangun daerah masih panjang dengan segala tantangan menghadang. Meski demikian, mengingat keunikan serta keberagaman wilayah Indonesia yang tidak bisa disamaratakan hanya dengan satu kebijakan terpusat, maka otonomi daerah sejatinya masih menjadi pilihan yang tepat untuk dijalankan di Indonesia. Kekuatan kepemimpinan daerah dalam menciptakan inovasi serta kolaborasi, hingga peningkatan kualitas SDM adalah syarat mutlak bagi daerah untuk mampu mengakselerasi pembangunan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik ke depan. Semoga. □